

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sikka (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Nita Tahun 2010)

Anitha Nurak (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Muh. Tamar (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: anitha.nurak@gmail.com

Abstract

The study was done in order to obtain a description and explanation of the implementation of PNPM Mandiri Rural community development in the district in Sikka district Nita. To obtain an explanation of the effectiveness of PNPM Mandiri Rural community development in the district in Sikka district Nita. To determine the factors that influence community development in District Nita Sikka regency. Data collection is done by way of interviews, documentation, and observation to support the acquisition of data.

Based on the analysis of data showed that the implementation of PNPM Mandiri Rural District in community development in Small and Medium Enterprises Nita especially those carried out on non-physical development. Consists of PNPM Mandiri program implemented in the field of Rural Productive Economic Enterprises (UEP) and the Special Women's Savings and Loans (SPKP). With indicators of participation in the planning of a) participation in brainstorming, b) active in submitting proposals / ideas, participation in the implementation of a) the willingness to take the time / and the power, b) willingness to provide material / materials, participation in the maintenance process with activity in the maintenance of the activity.

Keywords: empowerment, participation, development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, efektivitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menunjang perolehan data. Berdasarkan hasil analisis data dikemukakan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita terkhusus Usaha Kecil Menengah dilaksanakan pada pembangunan non fisik. Terdiri dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di bidang usaha ekonomi produktif (UEP) serta simpan pinjam khusus perempuan (SPKP). Dengan Indikator partisipasi dalam pelaksanaan yakni a)kesediaan dalam meluangkan waktu/dan tenaga, b)kesediaan dalam menyediakan bahan /materi, c)partisipasi dalam proses pemeliharaan yakni dengan keaktifan dalam pemeliharaan hasil kegiatan.

Kata kunci: pemberdayaan, partisipasi, pembangunan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Paradigma “pemberdayaan” memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagaman Bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralistik dalam pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksa-

naan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka berperan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini mulai memusatkan kegiatannya di wilayah perdesaan yakni PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahap kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas di desa masing-masing hingga pelaksanaan dan pemeliharannya.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, serta cakupan pembangunan diharapkan dapat berpihak pada masyarakat miskin dan upaya meningkatkan kesetaraan gender. Dampak signifikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat terlihat dari kenaikan belanja rumah tangga perdesaan. Fenomena ini merupakan hasil studi yang telah dilakukan di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar dibandingkan kecamatan non-program. Selanjutnya semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga perdesaan.

Berbicara mengenai suatu program tentu saja memiliki sisi kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan kompleks yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Walaupun telah terbukti beberapa daerah telah berhasil, namun masih ada saja daerah yang mengalami masalah. Baik dari segi perencanaan, maupun efektivitas pelaksanaannya.

Bertolak dari latar belakang lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di daerah, khususnya dari sudut pandang efektivitasnya.

Dengan mengangkat judul penelitian "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sikka (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Nita Tahun 2010)". Sebagai pijakan awal dari sebuah

penalaran lebih lanjut menuju sebuah pembangunan di daerah yang lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian adalah menggunakan metode studi kasus (case study) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu kebijakan atau proses tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka.

Di kabupaten Sikka, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dilaksanakan pada 20 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Kangae, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Doreng, Kecamatan Bola, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego, Kecamatan Paga, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Palue, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Lela, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Nelle, Kecamatan Wai-blama, Kecamatan Koting, serta Kecamatan Nita sendiri yang menjadi objek penelitian ini.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka dimulai pada tahun 2007 yang pada saat itu PNPM Mandiri Perdesaan menjalani masa pengenalan atau fase Sosialisasi. Memasuki tahun anggaran 2007/2008 hingga tahun anggaran 2008/2009. Program PNPM Mandiri Perdesaan memasuki fase internalisasi atau pelaksanaan program dilapangan. Sedangkan untuk tahun 2009/2010 hingga sekarang PNPM Mandiri Perdesaan masuk pada fase institusionalisasi/pelembagaan, dimana pada fase ini daerah mempunyai tugas untuk melestarikan/melembagakan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang dikenal dengan istilah exit strategi.

415 Klp
360 klp

Mengenai keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka, banyak pihak yang mendukung serta memberikan apresiasi serta harapan yang besar. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka dikatakan bahwa :

“Kami bersyukur atas dilaksanakannya Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka , sebab Program PNPM Mandiri Perdesaan sangat membantu kami dalam proses pembangunan daerah yang kami lakukan. Dimana Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Sikka sendiri.(Sumber Informan : kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka, 06 Maret 2012)

Dari apa yang diutarakan dari informan tersebut diatas, bisa dikatakan bahwa keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten Sikka mendapat sambutan yang besar dari pemerintah setempat. Bahkan sebagai komitmen dalam

menindaklanjuti Program PNPM Mandiri Perdesaan ini, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sikka telah menetapkan dana cost sharing bagi PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun anggaran 2010 sebesar 20% dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Dari kurun waktu tiga tahun pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka dapat kita lihat hasil pelaksanaannya pada tabel berikut ini:

Hasil Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 s/d 2011

No	Jenis kegiatan	Satuan	PNPM Mandiri Perdesaan		
			Siklus III	Siklus IV	Siklus V
1	SARANA PRASARANA UMUM				
	Jalan Rabat	Unit	20 unit	49 unit	55 unit
	TPT/Penahan tanah	Unit	1 unit	2 unit	3 unit
	Tembok Penahan abrasi Pantai	Unit	1 unit	2 unit	5 unit
	Saluran Irigasi	Unit	4 unit	1 unit	2 unit
	Pasar Desa	unit	2 unit	3 unit	1 unit
	Saluran Drainase	Unit	1 unit	1 unit	3 unit
2	SARANA PRASARANA PENDIDIKAN PRASARANA PENDIDIKAN/FISIK				
	Penambahan Ruang Kelas SD	Unit	4 unit	2 unit	5 unit
	Mess Guru	Unit	8 unit	6 unit	4 unit
	Pemb. PAUD/TKK	Unit	3 unit	5/4 unit	7 unit
	Pemb. Ruangan Perpustakaan	Unit	3 unit	1 unit	4 unit
	Meubeler Sekolah	Paket	3 paket	2 paket	5 paket
	Pagar Sekolah & Turap	Paket	5 paket	4 paket	6 paket
	NON SARPRAS				
	Pelatihan ketrampilan	Paket	3 paket	2 paket	4 paket
	Honor Guru Komite	Desa	5 desa	3 desa	5 desa
	Beasiswa	Paket	4 paket	2 paket	3 paket
3	SARANA PRASARANAKESEHATAN PRASARANA KESEHATAN/FISIK				
	Jaringan Perpipaian	Paket	4 paket	6 paket	5 paket

		ket		
	Posyandu (di 42 desa)	Unit	70 unit	92/95 unit
	Polindes	Unit	5 unit	7 unit
	Pustu	Unit	3 unit	1 unit
	Pagar Polindes	Unit	2 unit	1 unit
	MCK	Unit	2 unit	1 unit
	Sumur Resapan	Unit	1 unit	1 unit
NON SARPRAS				
	PMT	Unit	-	-
	Intensif Kader Posyan- du	Unit	-	-
4	SIMPAN PINJAM/ NON FISIK			
	SPKP	Unit	100 Klp	345 Klp
	UEP	Unit	170 klp	300 klp

SUMBER : DATA SEKUNDER DARI UPK Nita Tahun anggaran 2010

Dari tabel tersebut diatas dapat kita persentasekan bahwa untuk kegiatan sarana dan prasarana mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan menjadi kebutuhan paling mendesak untuk dilakukan. Dari hasil pelaksanaan dilapangan menunjukkan bahwa hasil kegiatan dibidang sarana dan prasarana menunjukkan persentase terbesar yaitu 42%, kemudian disusul kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dengan persentase 20%, bidang kesehatan 18%, Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), dan yang paling sedikit hasil pelaksanaannya adalah dibidang Pendidikan dengan persentase 13%.

Adapun jumlah bantuan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan seluruh kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka pada tahun 2010 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Rekapitulasi Anggaran Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka Tahun 2010

No.	Jenis kegiatan	Satuan	Biaya
1	SARANA PRASARANA UMUM		
	Jalan Rabat	49 unit	Rp. 15.457.861.800,00

	TPT/Penahan tanah	2 unit	Rp. 677.390.500,00
	Tembok Penahan abrasi Pantai	2 unit	Rp. 699.905.000,00
	Saluran Irigasi	1 unit	Rp. 311.754.000,00
	Pasar Desa	3 unit	Rp. 619.451.100,00
	Saluran Drainase	1 unit	Rp. 89.551.000,00
	Jumlah		Rp. 17.855.913.400,00
2	SARANA PRASARANA PENDIDIKAN PRASARANA PENDIDIKAN/FISIK		
	Penambahan Ruang Kelas SD	2 unit	Rp. 350.000.000,00
	Mess Guru	6 unit	Rp. 1.976.928.400,00
	Pemb. PAUD/TKK	5/4 unit	Rp. 1.012.477.100,00
	Pemb. Ruangan Perpustakaan	1 unit	Rp. 184.832.800,00
	Meubeler Sekolah	2 paket	Rp. 334.389.000,00
	Pagar Sekolah & Turap	4 paket	Rp. 547.666.200,00
	Jumlah		Rp. 4.406.293.500,00
NON SARPRAS			
	Pelatihan ketrampilan	2 paket	Rp. 430.521.500,00
	Honor Guru Komite	3 desa	Rp. 458.631.000,00
	Beasiswa	2 paket	Rp. 699.318.000,00
	Jumlah		Rp. 1.588.470.500,00
3	SARANA PRASARANA KESEHATAN PRASARANA KESEHATAN/FISIK		
	Jaringan Perpipaan	6 paket	Rp. 1.900.982.300,00
	Posyandu (di 42 desa)	92/95 unit	Rp. 10.014.160.650,00
	Polindes	7 unit	Rp. 1.776.558.300,00
	Pustu	1 unit	Rp. 326.072.600,00
	Pagar Polindes	1 unit	Rp. 65.148.300,00
	MCK	1 unit	Rp. 55.305.100,00
	Sumur Resapan	1 unit	Rp. 100.836.600,00
	Jumlah		Rp. 14.239.063.850,00
NON SARPRAS			
	PMT	-	-
	Intensif Kader Posyandu	-	-

	Jumlah		-
4	SIMPAN PINJAM/ NON FISIK		
	SPKP	345 Klp	Rp. 10.910.258.750,00
	UEP	-	-
	Jumlah		Rp. 10.910.258.750,00
	Total		Rp. 49.000.000.000,00

SUMBER: DATA SEKUNDER DARI UPK Nita Tahun anggaran 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sikka pada tahun 2010, jumlah dana yang diberikan mencapai Rp.49.000.000.000. yang dialokasikan untuk membiayai setiap kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan di 20 kecamatan.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa untuk pos pembiayaan yang terbesar ada pada pembiayaan bidang sarana dan prasarana umum yaitu sebesar Rp.17.855.913.400, kemudian pembiayaan terbesar kedua yaitu pada bidang kesehatan sebesar Rp.14.239.063.850. Untuk ditempat ketiga adalah pembiayaan bidang ekonomi yaitu Simpan Pinjam/ Non Fisik sebesar Rp.10.910.258.750. dan Rp.1.588.470.500, untuk membiayai kegiatan dibidang pendidikan.

Hasil Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Nita.

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Nita terkhusus dalam pemberdayaan bidang ekonomi mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat begitu pun juga dengan aparat pemerintah setempat.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan Nita mengenai keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan diwilayahnya menyatakan bahwa :

“Keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Nita ini diharap-

kan banyak membawa perubahan yang signifikan utamanya dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Kecamatan Nita. Diharapkan terjadinya proses pembelajaran politik demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu untuk menganalisis, mampu dalam menyatakan pendapat, berdiskusi, serta mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan” (sumber informan : Sekretaris Kecamatan Nita,06 Maret 2012)

Sedangkan menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Nita menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Nita ini kami harapkan jangan menjadi seperti program-program sebelumnya yang datang tanpa diundang pulang tak diantar. Maksudnya bahwa program sebelumnya terkadang diberikan tanpa kita butuhkan dan pada saat pelaksanaannya para pengelolanya kenyang sendiri. Mereka hanya memberikan sisasisanya kepada masyarakat. Bahkan kita tidak tahu apa yang menjadi hasil dari programnya”

Sebagaimana di dalam perencanaan kegiatan atau pada proses perencanaan program kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, diarahkan dalam menyampaikan gagasan, ide, keluhan-keluhan yang dirasakan selama ini yang kemudian ditampung untuk dijadikan prioritas usulan. Pada dasarnya dari hasil proses perencanaan program pada desa-desa di Kecamatan Nita banyak ide serta usulan yang dilemparkan masyarakat. Namun tidak semua usulan tersebut dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

Adapun Rekapitulasi dana PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan Nita tahun anggaran 2010 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Rekapitulasi dana PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan Nita tahun anggaran 2010

Lokasi	Alokasi dana			Prasara rana umum	Prasara rana pen- didi- kan	Prasara rana keseh- atan	Kegia- tan SPKP	Jumlah alokasi	Jumlah									
									1.833. 898.50 0	174.3 16.00 0	607.06 4.500	384.7 39.00 0	3.000. 000.00 0					
SUMBER : DATA SEKUNDER DARI UPK Nita Tahun anggaran 2010																		
Desa	kegiat an	Ju mlah	sa tu an															
Wuli- wutik	Jalan rabat	1	R ua s	350.00 0.000														
Bloro	Jalan rabat	1	R ua s	343.34 8.000														
Nita	Jalan rabat	1	R ua s	348.50 4.000														
Lakapi ager	Jalan rabat	2	U nit	206.64 8.000														
Tebuk	Jalan rabat	1	U ua s	236.10 1.000														
Riit	Jalan rabat	1	R ua s	349.29 7.500														
Ni- rangkli ung	Po- syan- du	1	U nit			122.94 6.500												
La- dogah ar	Polind es	1	U nit			213.57 6.000												
Tilang	Po- syan- du	1	U nit			89.720 .000,												
Nita kloang	Po- syan- du	2	U nit			180.80 4.000												
Ma- hebora	Honor guru	3	Or g			79.57 9.000												
Lu- sitada	Honor guru	5	Or g			94.73 7.000												
Wuli- wutik	Sim- pan pinjam	2	KI p					25.26 3.000										
Bloro	Sim- pan pinjam	1	KI p					10.52 7.000										
Nita	Sim- pan pinjam	4	KI p					87.36 8.000										
Lakapi ager	Sim- pan pinjam	1	KI p					15.79 0.000										
Tebuk	Sim- pan pinjam	6	KI p					92.63 3.000										
Lu- sitada	Sim- pan pinjam	2	KI p					31.57 9.000										
Tilang	Sim- pan pinjam	3	KI p					35.79 0.000										
Nita kloang	Sim- pan pinjam	5	KI p					85.78 9.000										

Untuk hasil Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Nita pada tahun anggaran 2010 dalam pembangunan non fisik dilakukan di dua bidang yaitu bidang pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) serta pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPKP) bagi para pelaku usaha kecil menengah.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Pembangunan Non Fisik.

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Nita dibidang pembangunan non fisik dilakukan di dua bidang yaitu bidang pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) serta pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPKP).

Menurut ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Nita menyatakan bahwa untuk dibidang pembangunan non fisik memiliki 2 kecenderungan yang diminta oleh masyarakat adalah tambahan modal usaha dan usaha baru yang dirintis. Usaha yang dilakukan cukup bervariasi mulai usaha peternakan, usaha kerajinan tenun, serta usaha penjualan roti.

Dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa di Kecamatan Nita terdapat 24 kelompok usaha usaha kecil menengah, yang skalanya masih menengah ke bawah atau masih dalam taraf industri rumah tangga. Melihat kondisi yang ada, UKM ini sangat potensial untuk dikembangkan utamanya dalam menunjang pendapatan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Nita terdapat beberapa kelompok usaha yang terdaftar. Beberapa kelompok tersebut mempunyai jenis usaha yang pada umumnya bergerak

dalam usaha perternakan dan selebihnya usaha jualan.

Dari data yang diambil dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Nita menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok usaha tersebut diberikan dana sebesar 540.525.600 dengan sifat dana sebagai pinjaman dan akan digulirkan kembali pada kelompok yang terdaftar pada usaha ekonomi produktif perguliran. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Daftar Desa Penerima Alokasi Dana UEP

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kegiatan	Jml Klp	JUMLAH DANA			Jumlah	Kumulatif
				Kegiatan	TPK	UPK		
1	Nita	UEP	2	61.000.000	1.926.200	1.284.100	64.210.300	
								164.210.300
2	Nitakoang	UEP	1	20.000.000	631.600	421.000	21.052.600	
								185.262.900
3	Bloro	UEP	1	5.500.000	173.700	115.800	5.789.500	
								191.052.400
TOTAL :								540.525.600
Sumber : Data Sekunder dari UPK Nita								Anggaran 2010

PNPM Mandiri Perdesaan Tahun anggaran 2010

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk Kecamatan Nita sendiri mendapat alokasi dana sebesar 540.525.600 dengan penggunaan dana kepada empat kelompok tersebut sebagai berikut:

Rekapitulasi Alokasi Dana Untuk Kelompok UEP Kecamatan Nita

Berdasarkan penjelasan dari UPK bahwa untuk bidang pengembangan usaha ekonomi produktif ini sudah ada usulan kelompok sampai pada tahap pemberian dana. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu kelompok regular yang sementara masih da-

lam proses produksi. Sedangkan Untuk kegiatan simpan pinjam SPKP yang dikelola

No	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana			Jumlah
			Kegiatan	TPK	UPK	
1	Sinar Nita	Perternakan	30.500.000	963.100	642.050	32.105.150
	Rawin Raja	Perternakan	30.500.000	963.100	642.050	32.105.150
2	Tati Nawing	Campuran	9.000.000	284.200	189.400	185.262.900
	Karya Tani	Campuran	5.500.000	173.700	115.800	191.052.400
TOTAL :			75500000	2384100	1589300	540.552.600

sumber : data sekunder dari UPK NITA

Tahun Anggaran 2010

husus oleh perempuan di kecamatan Nita ini terdapat 24 kelompok usaha yang terdaftar yaitu kelompok usaha simpan pinjam khusus perempuan (SPKP) pada Kecamatan.

Industri ikat tenun adalah salah satu industri kerajinan rumah tangga yang ada di Kecamatan Nita. Hingga saat ini, kelompok pengrajin yang terlibat dalam pembuatan Sarung Ikat Tenun ini sebanyak 24 kelompok yakni Kelompok Pliping Pleur pimpinan Maria Binda, Kelompok Mawar Rane pimpinan Maria, Kelompok Suri Pudi pimpinan Leli, Kelompok Lengi Petin pimpinan Ariani, Kelompok Hibir Pliti pimpinan Maria Cecilia, Kelompok Empu Kirana pimpinan yanti, Kelompok Melati I pimpinan Maria Ona, Kelompok Tibu Imung pimpinan Marselina, Kelompok Usaha Baru pimpinan Martilda, Kelompok La Tulipe pimpinan Ester, Kelompok Kasih Ibu pimpinan Idelina, Kelompok Suka Maju pimpinan Dahlia, Kelompok Duna Nora pimpinan Bertis, Kelompok Mawar pimpinan Lutpina, Kelompok Sinar Baot pimpinan Marta, Kelompok Wa'in Talin pimpinan Gerturdis, Kelompok Harapan Ibu pimpinan Benedita, Kelompok Kasih Ibu pimpinan Silvina, Kelompok Korosang pimpinan Adelina, Kelompok Intenik pimpinan Maria, Kelompok

Pedan Puhun pimpinan Florensia, Kelompok Plili Heling 2 pimpinan Maria Rosa, Kelompok Supin Loder pimpinan Anastasia, dan Kelompok Tating Naling pimpinan Elvi .

Sebagai salah satu kasus yakni Usaha ikat tenun Kelompok Suri Pudi pimpinan Leli yang ada di Desa Bloro kecamatan Nita pada awalnya adalah usaha yang dibiayai dari dana SPKP salah satu Program PNPM Mandiri Perdesaan, didirikan oleh seorang warga bernama Leli pada tahun 2009. Usaha ini didirikan dengan alasan bahwa usaha ini cukup menguntungkan untuk dikembangkan dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hingga sekarang, usaha ini telah berkembang menjadi kelompok usaha dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang. Usaha ini kemudian diikuti oleh beberapa masyarakat yang pernah menjadi karyawan atau pernah belajar dari Ibu Leli.

Bahan baku pembuatan ikat tenun diperoleh dari toko bahan baku tekstil terdekat yang ada di Kota Maumere. Bahan yang mereka gunakan terdiri dari benang seda, benang, alat celup yang sering disebut natol. Proses pembuatan tenun ikat ini dilakukan secara manual, tanpa sentuhan teknologi, dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti plapan, tuan, pine, ekur, bolen, pati, lorun, hawen, legun, legun anak, seler, tebuk, Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Leli

”Usaha ini saya dirikan pada tahun 2009, dengan modal yang kecil. Waktu itu, kondisi sangat miskin, pendapatan sebagai petani ladang hanya cukup untuk membeli beras, ikan dan sayur sehari-hari. Waktu itu, saya mulai berpikir, kira-kira usaha yang bisa menambah penghasilan. Akhirnya, saya mencoba menekuni Tenun Ikat, hasilnya belum bagus, tidak rapi tapi laku dijual. Lama kemudian, berkembang. Sesuai pengalaman, sarung yang saya buat tambah bagus.

Alatnya sederhana, banyak dijual, demikian juga dengan bahannya”

Demikian pula pernyataan Ibu Marta:

“dulunya....saya hanya Ibu Rumah Tangga biasa, tidak punya pekerjaan. Akhirnya saya ikut-ikutan dengan Ibu Leli. Awalnya, cuma melihat-lihat saja, akhirnya saya berani juga untuk mencoba, apalagi alat yang digunakan biasa, tidak susah. Bahannya disiapkan oleh Ibu Leli. Sekarang, saya sudah bisa membuat sendiri sarung, orang biasa sebut utan dan Ragi”.

Harga bahan baku yang digunakan dalam kelompok ini cukup bervariasi antara toko yang satu dengan yang lain, namun perbedaannya sangat kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai harga bahan baku dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Jenis dan Harga Bahan Baku Pembuatan Tenun Ikat

No	Jenis Bahan Baku	Harga
1.	Benang seda,	Rp.
2.	benang, alat celup	50.000/bantal
3.	Benang	Rp.
	Alat Celup	50.000/bantal
		Rp. 20.000/ons
	Jumlah	Rp. 120.000

Sumber : Hasil Wawancara, 2012.

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga bahan baku pembuatan tenun ikat cukup terjangkau, sehingga modal yang digunakan juga relatif lebih kecil dengan resiko kerugian yang rendah. Jika dilihat dari harga bahan baku, maka kerajinan tenun ikat ini memiliki prospek untuk dikembangkan, karena modal yang digunakan relatif kecil dengan ketersediaan bahan baku yang cukup terjangkau di pasaran. Biaya sebesar Rp. 120.000,- cukup untuk membuat 1 sarung.

Sepintas lalu program Simpan pinjam perempuan ini memang agak mirip dengan

kegiatan usaha ekonomi Produktif adapun yang membedakan antara Simpan pinjam perempuan dengan usaha ekonomi produktif ini adalah pada Simpan pinjam perempuan yang mengelolanya adalah khusus perempuan sedangkan di usaha ekonomi produktif dikelola oleh campuran antara perempuan dan laki-laki yang mempunyai usaha sendiri.

Secara umum kegiatan simpan pinjam yang pengelolanya diberikan kepada perempuan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Sedangkan secara khusus kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini adalah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

Dari keterangan yang diperoleh dari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Nita menyatakan bahwa untuk kegiatan ini alokasi dana yang diberikan maksimal 25 % dari alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM). Dalam alokasi dana tersebut setiap desa diberikan dana tidak boleh lebih dari 10 juta dan dari 10 juta tersebut sudah termasuk biaya operasional Unit pengelola Kegiatan (UPK) yang bertempat dikecamatan sebanyak 2 % dan 3 % untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Lanjut dikatakan bahwa dalam pengelolaan kegiatan ini ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan oleh setiap kelompok yang ingin mendapatkan dana, ketentuan tertentu adalah sebagai berikut:

a. Kelompok yang berhak menerima SPKP adalah kelompok: (1) Beranggotakan pe-

empuan yang mempunyai yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun; (2) mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dan simpanan dan dan pinjaman yang telah disepakati; (3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan; (4) Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik; (5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

b. Penyaluran dana BLM tidak diperkenankan adanya syarat agunan kepada kelompok

c. Pengembalian dana dari dana SPKP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPKP kembali baik kelompok lama ataupun kelompok yang baru sesuai dengan ketentuan dana perguliran.

Secara umum, semua tabel yang ditampilkan tersebut menggambarkan tentang operasionalisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Kegiatan yang dilakukan tersebut mempunyai sifat peruntukan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Nita.

Dari apa yang yang telah dilaksanakan di Kecamatan Nita tersebut dapat diukur bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Nita yakni terbatasnya modal usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dikarenakan adanya pembagian yang dilakukan oleh pihak pelaksana program ini secara merata. Serta diharapkan untuk seterusnya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Nita dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan yang didalamnya berupa pelatihan usaha dan dukungan kelembagaan, dan penghantaran sumber daya berupa bantuan modal usaha dan dukun-

gan sarana dan prasarana kepada kelompok usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa indikator yang telah dikemukakan diatas mencerminkan suatu upaya menuju suatu perubahan yang berarti dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya dalam pemenuhan kebutuhan yang dirasakan sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya jenis kegiatan/program tersebut perlu untuk dilaksanakan sebagai konsekuensi tanggungjawab moral pemerintah demi tercapainya kesejahteraan rakyat utamanya didaerah pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Gambaran mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

a) Dilihat dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Nita ini, dalam proses perencanaannya memiliki kendala, dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa.

b) Dilihat dari indikator pelaksanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Nita ini dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPKP.

c) Dilihat dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Nita masyarakat terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan, baik dalam memelihara segala prasarana dan sarana, serta kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam dari program SPKP yang ada secara kontinyu.

2. Efektivitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

a) Program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Nita setiap tahun mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan jumlah dan kualitas masyarakat yang dapat diberdayakan, peningkatan dalam sarana dan prasarana, serta yang paling penting adalah terus meningkatnya minat dari masyarakat dalam mengapresiasi program ini.

b) PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bentuk pengembangan dari model perencanaan pembangunan yang berpihak pada pembangunan manusia khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Nita.

c) Efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita setelah melihat mekanisme pembagian kinerja ini, terlihat ada beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang terlihat mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dari PNPM Mandiri Perdesaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press
- Adi, Kwartono.M, 2007, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta; Andi.
- Culla, Adi Suryadi.,2002, *Masyarakat Madani: Pemikiran,Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Gany. R.A. 2001. *Kemandirian Lokal*. Hasanuddin Press. Makassar.
- Haris , Syamsuddin.(Ed), 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, Jakarta : LIPI Press
- Hidjaz,Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Refleksi Pers.
- Husaini Usman,M.Pd. M.T,Prof.Dr,dan Purnomo.S.A,M.Pd. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, cet.ke-2*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Josef, R. Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Kansil, C.S.T., 1991, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Koswara, E., 2001, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta : Pariba
- Labolo, M., 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Raja Grafindo
- Muluk, Khairul,M.R, 2007, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang : Bayumedia Publising
- Narayan, Deepa. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction*. Washington DC : The World Bank.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*, Jakarta : Rineka Cipta,
- , 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 2)*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Prasojo, Eko, dkk, 2007, *Pemerintah Daerah*, Jakarta ; Universitas Terbuka
- Prawirokusumo, S, 1999, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)*, Yogyakarta; BPFE
- Sabarno, Hari., 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika
- Salam, Dharma Setyawan, 2007, *Menajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djembatan,
- Salman, Darmawan. 2002. *Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah, PSKMP Unhas, Makasar.
- Sani, M.Y. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan*. Laboratorium Pembangunan Masyarakat. Program Pascasarjana UNHAS. Makassar.
- Sayogyo. 1994. *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sufyanto, 2001, Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & LP2IF
- Suharto, Ph.D. Edi., 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : PT.Refika Aditama
- Sulistiyani, A.T., 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta ; Gaya Media
- Sulistiyani,A.T., 2005, Memahami Good Governance Dalam Perspektf Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Gava Media
- Sunarno, S., 2008, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Tikson, Deddy T., Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand (Keterbelakangan dan Ketergantungan).
- Tikson, Deddy T. 2001. Community Development I. PPs-UNHAS. Makassar.
- Wijaya, Haw., 2003, Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Jakarta : PT Grafindo Persada
- Wiranto, T. 1999. Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah. Cisarua.
- Moleong, L.J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soehartono, Irawan.,2008, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tim Penyusun, 2008/2009. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Skripsi, Makassar : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Hasanuddin.
- Yin, Robert. K, 2009, Studi Kasus; Desain dan Metode, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Sugino,Prof.Dr. 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfaberta: Jakarta
- Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Dokumen Lainnya
- Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Kabupaten Sikka
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Poko dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka.
- D. Website
PNPM Mandiri Perdesaan, 2012 (<http://www.pnpm-mandiri.org/>) diakses 24 Maret 2012.

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sikka
2010 (<http://sikkakab.go.id/>)
diakses 11 Maret 2012

Suhartono, Kondisi-Usaha-Kecil-dan-
Menengah-di-Provinsi-Bali---Antara-
Kebijakan-Kemitraan-dan-Persaingan-
2008.pdf (<http://www.suhartono@dpr.go.id>)
diakses 9 Maret 2012